

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021		Unit Penanggung Jawab																					
				K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K		Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	100	92.04																													
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	ST																													
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kenaikan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun			14	%	3.710.842.900	0	%	66.617.224	21	%	1.431.897.506	21	%	2.693.957.934	21	%	3.338.055.998	21	%	3.338.055.998	150	89.95	21	%	3.338.055.998	150	89.95																	
		2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa dengan administrasi yang baik			14	%	3.710.842.900	0	%	66.617.224	7	%	1.431.897.506	7	%	2.693.957.934	7	%	3.338.055.998	14	%	3.338.055.998	100	89.95	14	%	3.338.055.998	100	89.95																	
		2.13.04.1.01.02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mampu mengelola administrasi pemerintah desa			88	orang	219.177.200	0	orang	9.205.300	0	orang	18.375.500	0	orang	26.635.900	85	orang	156.229.993	85	orang	156.229.993	96.59	71.28	85	orang	156.229.993	96.59	71.28																	
		2.13.04.1.01.03 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang mampu mengelola administrasi pemerintah desa			88	orang	134.406.200	0	orang	0	0	orang	48.658.268	88	orang	85.226.959	88	orang	85.226.959	88	orang	85.226.959	100	63.41	88	orang	85.226.959	100	63.41																	
		2.13.04.1.01.05 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang terampil dalam Sistem Keuangan Desa			33	orang	134.441.000	0	orang	2.655.000	0	orang	48.658.268	0	orang	48.658.268	33	orang	98.441.551	33	orang	98.441.551	100	73.22	33	orang	98.441.551	100	73.22																	
		2.13.04.1.01.06 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa dengan penginventarisasian aset sesuai dengan regulasi			33	desa	158.733.000	0	desa	0	0	desa	9.870.000	0	desa	9.870.000	33	desa	101.419.240	33	desa	101.419.240	100	63.89	33	desa	101.419.240	100	63.89																	
		2.13.04.1.01.08 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang berprestasi			6	desa	600.086.000	0	desa	0	0	desa	3.660.000	0	desa	312.940.000	6	desa	520.600.000	6	desa	520.600.000	100	86.75	6	desa	520.600.000	100	86.75																	
			Jumlah kelurahan yang berprestasi			6	kelurahan	0	0	kelurahan	0	0	kelurahan	0	0	kelurahan	0	6	kelurahan	0	6	kelurahan	0	100	0	6	kelurahan	0	100	0																	
		2.13.04.1.01.09 Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru			25	desa	194.007.900	0	desa	21.449.572	0	desa	115.864.886	0	desa	136.945.286	25	desa	166.115.586	25	desa	166.115.586	100	85.62	25	desa	166.115.586	100	85.62																	
		2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDESA yang aktif			45	bumdesa	2.269.991.600	0	bumdesa	33.307.352	0	bumdesa	1.235.468.852	0	bumdesa	2.110.250.212	45	bumdesa	2.210.022.669	45	bumdesa	2.210.022.669	100	97.36	45	bumdesa	2.210.022.669	100	97.36																	
			Jumlah Pasar Desa yang aktif			50	pasar desa	0	0	pasar desa	0	0	pasar desa	0	0	pasar desa	0	50	pasar desa	0	50	pasar desa	0	100	0	50	pasar desa	0	100	0																	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																	99.62	77.36																													
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																	ST	T																													
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	100	89.95																													
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	T																													
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kenaikan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun			14	%	4.333.077.800	0	%	376.765.383	21	%	1.444.430.429	21	%	1.995.818.429	21	%	3.329.133.445	21	%	3.329.133.445	150	76.83	21	%	3.329.133.445	150	76.83																	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kesempatan/ peluang kepada SDM/ Aparatur guna meningkatkan kapasitas kemampuan. - Optimalisasi potensi sumber daya alam di desa yang bisa dikerjakannya untuk mempercepat dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dalam berbagai bidang. - Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. - Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan kehadiran Masyarakat pada kegiatan gotong royong bersama dengan TNI dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Partisipasi Masyarakat juga merupakan modal utama dalam pembentukan BUMDesa. Tahapan pertama yang dapat dilakukan adalah Perencanaan, dalam tahap perencanaan yang harus dikerjakan adalah pembentukan organisasi, menentukan jenis usaha, membuat kerangka usaha. Ketiga hal tersebut harus direncanakan dengan matang dan detail agar badan usaha dapat terwujud dan berkembang dengan baik. Setelah melakukan tahap perencanaan selanjutnya melakukan pengamatan, pemerintah desa perlu mengamati potensi dan aset desa yang dapat dijadikan usaha BUMDesa. Dalam tahapan pengamatan ini sangat penting untuk benar-benar memahami potensi perkembangan usaha yang akan dijalankan melalui BUMDesa. Setelah menyelesaikan tahap pengamatan dan mendapatkan data potensi apa saja yang dapat dijadikan usaha BUMDesa selanjutnya perlu melakukan penataan. Hal ini penting karena dalam tahap pengamatan biasanya akan banyak jenis usaha yang muncul, maka kemudian harus dilakukan seleksi dan penataan yang tepat, sehingga dapat diperoleh usaha mana yang paling memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai usaha andalan. Usaha BUMDesa yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena dana desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha. Baik itu pengeluaran. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi. - Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Yang berada di 11 kabupaten di Provinsi. Sedangkan tujuan pembentukan BUMDes antara lain : meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa, Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. - PMD Prov. Melakukan supervisi, koordinasi dan motivasi serta asistensi kepada dinas PMD Kabupaten, kepada peserta desa beserta perangkat-perangkatnya. Sumber anggaran yang cukup memadai untuk mensupport kegiatan siskeudes dan sipades. Bupati/Kepala Daerah agar memperhatikan dan mensupport kepada SKPD terkait di wilayahnya dalam hal melaksanakan Siskeudes sebagaimana yang telah dihimbau oleh Kemendagri RI dan Gubernur Kalsel dalam hal ini dinas PMD Provinsi Kalsel sebagai motivator dan koordinator untuk pelaksanaan Siskeudes dan Sipades. - Peraturan yang terkait dengan penguatan kelembagaan adat dan budaya dan SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan adat dan budaya di Kalsel. - Sumber daya manusia (LPM dan Pokjnal Posyandu) sebagai pelaku dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi lembaga LPM dalam kegiatan pembangunan desa berupa penyusunan dan perencanaan program, koordinasi dan musyawarah desa. - SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan layanan sosial dasar terutama yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban. - Partisipasi PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. - Sumber dana sebagai faktor pendorong yang berpengaruh terhadap peningkatan status desa

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : - Realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; - Belum terdapat basis data; - Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi desa terkait kerjasama desa, mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik, menyusun/ membuat peraturan-peraturan desa, masih kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan Siskeudes, sipades, profil desa, IDM; - Kurangnya koordinasi antara DPMD Provinsi dengan Pihak TNI baik dari Korem maupun Kodim, sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa; - Selain itu, kendala aparat desa yang sering berganti; - Jaringan pendukung/akses internet yang terbatas/belum terjangkau; dan kurangnya pengetahuan aparat tentang IT; - Penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang belum tertib; - Masih adanya perbedaan pendapat pada input data IDM; - Masih adanya Aparat Desa yang tidak ingin desanya naik status karna terkait Dana Desa; - Kemudian juga kurangnya kebutuhan teknologi dan sarana prasarana dasar yang ada di desa seperti komputer atau laptop, sehingga data yang dibutuhkan menjadi lama, tidak update dan relevansinya diragukan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : - Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/ Aparatur dalam mengidentifikasi potensi desa; - Melakukan rapat koordinasi antara DPMD Provinsi dengan pihak TNI agar setiap tahapan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa berjalan dengan optimal; - Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan; - Meningkatkan koordinasi dinas PMD kabupaten dengan dinas PMD provinsi dengan desa-desa di wilayahnya; - Melakukan kunjungan/ klarifikasi lapangan terhadap lokasi desa/ kelurahan; - Meningkatkan koordinasi Dinas PMD Kabupaten dengan Dinas PMD Provinsi beserta desa-desa; - Dinas PMD sekaligus melakukan pembinaan terkait cara penyusunan laporan keuangan yang tertib dan benar; - Monitoring dan Evaluasi baik itu oleh pihak Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan meminimalisir kesalahan pada saat input Data IDM, Siskeudes, Sipades dan Prodeskel; - Terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi desa dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan agar desa terus aktif berkegiatan; - Melakukan koordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota.

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		K (%)	Rp (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
		2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			14 %	4.333.077.800	0 %	376.765.383	56 %	1.444.430.429	56 %	1.995.818.429	56 %	3.329.133.445	56 %	3.329.133.445	400	76.83	56 %	3.329.133.445	400	76.83				
		2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat dan budaya desa yang aktif			11 buah	552.225.400	0 buah	1.567.000	0 buah	39.723.600	0 buah	73.857.600	10 buah	375.648.600	10 buah	375.648.600	90.91	68.02	10 buah	375.648.600	90.91	68.02				
		2.13.05.1.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader dan Pendamping Desa yang mampu dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa			198 orang	1.078.459.000	0 orang	223.974.600	0 orang	612.954.900	0 orang	761.521.500	198 orang	869.774.800	198 orang	869.774.800	100	80.65	198 orang	869.774.800	100	80.65				
		2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif			50 lembaga kemasyarakatan desa	729.034.300	0 lembaga kemasyarakatan desa	42.259.783	0 lembaga kemasyarakatan desa	310.658.129	0 lembaga kemasyarakatan desa	340.849.729	55 lembaga kemasyarakatan desa	608.146.245	55 lembaga kemasyarakatan desa	608.146.245	110	83.42	55 lembaga kemasyarakatan desa	608.146.245	110	83.42				
			jumlah aparatur pokjanal posyandu yang dibina			650 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	600 orang	600 orang	600 orang	92.31	600 orang	92.31	600 orang	92.31	600 orang	92.31					
			jumlah kabupaten dan kota yg dibina terkait SIP			13 kab/kota	0	0 kab/kota	0	0 kab/kota	0	0 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	100	13 kab/kota	100	13 kab/kota	100	13 kab/kota	100					
		2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan			50 buah	450.483.000	0 buah	38.595.000	0 buah	103.315.000	0 buah	145.960.200	53 buah	292.721.200	53 buah	292.721.200	106	64.98	53 buah	292.721.200	106	64.98				
		2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat desa yang diberdayakan dalam pemulihan dan pemanfaatan sumber daya alam			5 kelompok	984.451.400	0 kelompok	25.810.600	0 kelompok	254.544.000	0 kelompok	450.803.800	5 kelompok	790.920.400	5 kelompok	790.920.400	100	80.34	5 kelompok	790.920.400	100	80.34				
			Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa			30 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	95 buah	95 buah	95 buah	316.67	95 buah	316.67	95 buah	316.67	95 buah	316.67					
		2.13.05.1.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah layanan sosial dasar yang aktif			22 buah	227.097.700	0 buah	30.113.100	0 buah	79.430.300	0 buah	131.220.700	22 buah	182.049.000	22 buah	182.049.000	100	80.16	22 buah	182.049.000	100	80.16				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kesempatan/ peluang kepada SDM/ Aparatur guna meningkatkan kapasitas kemampuan. - Optimalisasi potensi sumber daya alam di desa yang bisa dikerjakasikan untuk mempercepat dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dalam berbagai bidang. - Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. - Partisipasi Masyarakat yaitu kehadiran dan keaktifan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan kehadiran Masyarakat pada kegiatan gotong royong bersama dengan TNI dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Partisipasi Masyarakat juga merupakan modal utama dalam pembentukan BUMDesa. Tahapan pertama yang dapat dilakukan adalah Perencanaan, dalam tahap perencanaan yang harus dikerjakan adalah pembentukan organisasi, menentukan jenis usaha, membuat kerangka usaha. Ketiga hal tersebut harus direncanakan dengan matang dan detail agar badan usaha dapat terwujud dan berkembang dengan baik. Setelah melakukan tahap perencanaan selanjutnya melakukan pengamatan, pemerintah desa perlu mengamati potensi dan aset desa yang dapat dijadikan usaha BUMDesa. Dalam tahapan pengamatan ini sangat penting untuk benar-benar memahami potensi perkembangan usaha yang akan dijalankan melalui BUMDesa. Setelah menyelesaikan tahap pengamatan dan mendapatkan data potensi apa saja yang dapat dijadikan usaha BUMDesa selanjutnya perlu melakukan penataan. Hal ini penting karena dalam tahap pengamatan biasanya akan banyak jenis usaha yang muncul, maka kemudian harus dilakukan seleksi dan penataan yang tepat, sehingga dapat diperoleh usaha mana yang paling memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai usaha andalan. Usaha BUMDesa yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena dana desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai untuknya dan memberikan keuntungan. Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha. Baik itu pengeluaran, sampai pemasukan. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi. - Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhankesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Yang berada di 11 kabupaten di Provinsi. Sedangkan tujuan pembentukan BUMDes antara lain : meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa, Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. - PMD Prov. Melakukan supervisi, koordinasi dan motivasi serta asistensi kepada dinas PMD Kabupaten, kepada peserta desa beserta perangkat-perangkatnya. Sumber anggaran yang cukup memadai untuk mensuport kegiatan siskeudes dan sipades. Bupati/Kepala Daerah agar memperhatikan dan mensuport kepada SKPD terkait di wilayahnya dalam hal melaksanakan Siskeudes sebagaimana yang telah dihimbau oleh Kemendagri RI dan Gubernur Kalsel dalam hal ini dinas PMD Provinsi Kalsel sebagai motivator dan koordinator untuk pelaksanaan Siskeudes dan Sipades. - Peraturan yang terkait dengan penguatan kelembagaan adat dan budaya dan SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan adat dan budaya di Kalsel. - Sumber daya manusia (LPM dan Pokjanal Posyandu) sebagai pelaku dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi lembaga LPM dalam kegiatan pembangunan desa berupa penyusunan dan perencanaan program, koordinasi dan musyawarah desa. - SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan layanan sosial dasar terutama yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban. - Partisipasi PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. - Sumber dana sebagai faktor pendorong yang berpengaruh terhadap peningkatan status desa

Faktor Penghambat pencapaian kinerja : - Realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; - Belum terdapat basis data; - Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi desa terkait kerjasama desa, mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik, menyusun/ membuat peraturan-peraturan desa, masih kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan Siskeudes, sipades, profil desa, IDM; - Kurangnya koordinasi antara DPMD Provinsi dengan Pihak TNI baik dari Korem maupun Kodim, sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa; - Selain itu, kendala aparat desa yang sering berganti; - Jaringan pendukung/akses internet yang terbatas/belum terjangkau; dan kurangnya pengetahuan aparat tentang IT; - Penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang belum tertib; - Masih adanya perbedaan pendapat pada input data IDM; - Masih adanya Aparat Desa yang tidak ingin desanya naik status karna terkait Dana Desa; - Kemudian juga kurangnya kebutuhan teknologi dan sarana prasarana dasar yang ada di desa seperti komputer atau laptop, sehingga data yang dibutuhkan menjadi lama, tidak update dan relevansinya diragukan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : - Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/ Aparatur dalam mengidentifikasi potensi desa; - Melakukan rapat koordinasi antara DPMD Provinsi dengan pihak TNI agar setiap tahapan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa berjalan dengan optimal; - Mengidentifikasi kegiatan dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan; - Meningkatkan koordinasi dinas PMD kabupaten dengan dinas PMD provinsi dengan desa-desa di wilayahnya; - Melakukan kunjungan/ klarifikasi lapangan terhadap lokasi desa/ kelurahan; - Meningkatkan koordinasi Dinas PMD Kabupaten dengan Dinas PMD Provinsi beserta desa-desa; - Dinas PMD sekaligus melakukan pembinaan terkait cara penyusunan laporan keuangan yang tertib dan benar; - Monitoring dan Evaluasi baik itu oleh pihak Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan meminimalisir kesalahan pada saat input Data IDM, Siskeudes, Sipades dan Prodeskel; - Terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi desa dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan agar desa terus aktif berkegiatan; - Melakukan koordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota.

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021		Unit Penanggung Jawab								
				K	Rp (Ribu)		K	Rp (Ribu)	I		II		III		IV		K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)									
1	2	3	4	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K (%)	Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	16							
		2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang dibina					13	PKK	311.327.000	0	PKK	14.445.300	0	PKK	43.804.500	0	PKK	91.604.900	13	PKK	209.873.200	13	PKK	209.873.200	100	67.41	13	PKK	209.873.200	100	67.41	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				121.59	75												
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST	S												
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																				400	76.83												
Predikat Kinerja Kegiatan																				ST	T												
Jumlah Anggaran dan Realisasi Seluruh Program								22.087.834.496			2.160.688.942			7.113.458.938			10.709.878.365			18.391.300.533			18.391.300.533										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																				140	84.77												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																				ST	T												
<p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kesempatan/ peluang kepada SDM/ Aparatur guna meningkatkan kapasitas kemampuan. - Optimalisasi potensi sumber daya alam di desa yang bisa dikerjasamakan untuk mempercepat dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dalam berbagai bidang. - Tata kelola administrasi pemerintahan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. - Partisipasi Masyarakat yaitu kehadiran dan keaktifan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang diwujudkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan kehadiran Masyarakat pada kegiatan gotong royong bersama dengan TNI dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Partisipasi Masyarakat juga merupakan modal utama dalam pembentukan BUMDesa. Tahapan pertama yang dapat dilakukan adalah Perencanaan, dalam tahap perencanaan yang harus dikerjakan adalah pembentukan organisasi, menentukan jenis usaha, membuat kerangka usaha. Ketiga hal tersebut harus direncanakan dengan matang dan detail agar badan usaha dapat terwujud dan berkembang dengan baik. Setelah melakukan tahap perencanaan selanjutnya melakukan pengamatan, pemerintah desa perlu mengamati potensi dan aset desa yang dapat dijadikan usaha BUMDesa. Dalam tahapan pengamatan ini sangat penting untuk benar-benar memahami potensi perkembangan usaha yang akan dijalankan melalui BUMDesa. Setelah menyelesaikan tahap pengamatan dan mendapatkan data potensi apa saja yang dapat dijadikan usaha BUMDesa selanjutnya perlu melakukan penataan. Hal ini penting karena dalam tahap pengamatan biasanya akan banyak jenis usaha yang muncul, maka kemudian harus dilakukan seleksi dan penataan yang tepat, sehingga dapat diperoleh usaha mana yang paling memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai usaha andalan. Usaha BUMDesa yang telah berjalan harus memiliki pemeliharaan yang baik, hal ini wajib hukumnya karena dana desa yang menjadi modal penggerak harus benar-benar tersalurkan sesuai peruntukannya dan memberikan keuntungan. Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha. Baik itu pengeluaran, sampai pemasukan. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi. - Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhankesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Yang berada di 11 kabupaten di Provinsi. Sedangkan tujuan pembentukan BUMDes antara lain : meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa, Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. - PMD Prov. Melakukan supervisi, koordinasi dan motivasi serta asistensi kepada dinas PMD Kabupaten, kepada peserta desa beserta perangkat-perangkatnya. Sumber anggaran yang cukup memadai untuk mensuport kegiatan siskeudes dan sipades. Bupati/Kepala Daerah agar memperhatikan dan mensuport kepada SKPD terkait di wilayahnya dalam hal melaksanakan Siskeudes sebagaimana yang telah dihimbau oleh Kemendagri RI dan Gubernur Kalsel dalam hal ini dinas PMD Provinsi Kalsel sebagai motivator dan koordinator utnuk pelaksanaan Siskeudes dan Sipades. - Peraturan yang terkait dengan penguatan kelembagaan adat dan budaya dan SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan adat dan budaya di Kalsel. - Sumber daya manusia (LPM dan Pokjanal Posyandu) sebagai pelaku dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi lembaga LPM dalam kegiatan pembangunan desa berupa penyusunan dan perencanaan program, koordinasi dan musyawarah desa. - SDM dari instansi dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan layanan sosial dasar terutama yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban. - Partisipasi PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. - Sumber dana sebagai faktor pendorong yang berpengaruh terhadap peningkatan status desa</p> <p>Faktor Penghambat pencapaian kinerja : - Realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; - Belum terdapat basis data; - Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi desa terkait kerjasama desa, mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik, menyusun/ membuat peraturan-peraturan desa, masih kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan Siskeudes, sipades, profil desa, IDM; - Kurangnya koordinasi antara DPMD Provinsi dengan Pihak TNI baik dari Korem maupun Kodim, sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa; - Selain itu, kendala aparat desa yang sering berganti; - Jaringan pendukung/akses internet yang terbatas/belum terjangkau; dan kurangnya pengetahuan aparat tentang IT; - Penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang belum tertib; - Masih adanya perbedaan pendapat pada input data IDM; - Masih adanya Aparat Desa yang tidak ingin desanya naik status karna terkait Dana Desa; - Kemudian juga kurangnya kebutuhan teknologi dan sarana prasarana dasar yang ada di desa seperti komputer atau laptop, sehingga data yang dibutuhkan menjadi lama, tidak apdate dan relevansinya diragukan.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : - Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/ Aparatur dalam mengidentifikasi potensi desa; - Melakukan rapat koordinasi antara DPMD Provinsi dengan pihak TNI agar setiap tahapan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa berjalan dengan optimal; - Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan; - Meningkatkan koordinasi dinas PMD kabupaten dengan dinas PMD provinsi dengan desa-desa di wilayahnya; - Melakukan kunjungan/ klarifikasi lapangan terhadap lokasi desa/ kelurahan; - Meningkatkan koordinasi Dinas PMD Kabupaten dengan Dinas PMD Provinsi beserta desa-desa; - Dinas PMD sekaligus melakukan pembinaan terkait cara penyusunan laporan keuangan yang tertib dan benar; - Monitoring dan Evaluasi baik itu oleh pihak Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan meminimalisir kesalahan pada saat input Data IDM, Siskeudes, Sipades dan Prodeskel; - Terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi desa dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan agar desa terus aktif berkegiatan; - Melakukan koordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota.</p>																																	